

PENYERAHAN LHP ATAS LKPD TA 2010 KEPADA BEBERAPA DAERAH

BPK RI Perwakilan Sumatera Utara pada bulan September 2011 menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2010 kepada beberapa daerah. Kegiatan ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 7 ayat (1) bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, dan Pasal 8 ayat (1) bahwa untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. [arra]



8 September 2011
Penyerahan LHP atas LKPD Pemkab Nias



9 September 2011
Penyerahan LHP atas LKPD Pemkab Nias Barat



16 September 2011
Penyerahan LHP atas LKPD
Pemkab Padang Lawas Utara



22 September 2011
Penyerahan LHP atas LKPD Pemko Sibolga



26 September 2011
Penyerahan LHP atas LKPD
Pemkab Tapanuli Tengah



26 September 2011
Penyerahan LHP atas LKPD
Pemkab Toba Samosir



Tahun Keempat
Edisi September 2011



Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut) telah menerima semua Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010 (LKPD TA 2010) dari 34 pemerintah daerah yang menjadi entitasnya, meliputi 33 Pemerintah Kabupaten/Kota dan 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut menerima LKPD Tahun Anggaran 2010 pertama kali pada bulan Maret 2011, saat itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo menyerahkan LKPD TA 2010

pada 16 Maret 2011. Sedangkan LKPD Tahun Anggaran 2010 yang terakhir diterima adalah LKPD TA 2010 dari Pemerintah Kota (Pemko) Gunung Sitoli, yang diserahkan pada 20 September 2011.

Adapun tiga entitas yang berada pada urutan teratas entitas yang menyerahkan LKPD TA 2010 berdasarkan waktu penyerahannya adalah Pemkab Karo (16 Maret 2011), Pemkab Tapanuli Utara (21 Maret 2011), dan Pemko Tebing Tinggi (24 Maret 2011). Sedangkan tiga entitas yang berada pada urutan terbawah entitas yang menyerahkan LKPD TA 2010 berdasarkan waktu penyerahannya adalah

Pemkab Batubara (5 September 2011), Pemkab Nias Selatan (8 September 2011), dan Pemko Gunung Sitoli (20 September 2011).

Menindaklanjuti penyerahan LKPD tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut segera memberangkatkan tim untuk ditugaskan melakukan pemeriksaan atas LKPD tersebut. Tim Pemeriksaan atas LKPD TA 2010 yang terakhir diberangkatkan adalah Tim Pemeriksaan atas LKPD TA 2010 Pemko Gunung Sitoli. Tim tersebut mulai bertugas sejak 26 September 2011. [arra]

REDAKSI

Mikael PH Togatorop (mt),
Ermila Octhari (mil), Suhendri (henz),
Totok (ttk), Ardhiyan (ard), Arief R (arra),
Diah Kusumawati Rukminingtyas (dkr),
Awie PramaYudha (wie)

ALAMAT REDAKSI :

BPK RI Perwakilan Provinsi
Sumatera Utara Lantai I,
Jl. Imam Bonjol No.22 Medan
Telp. 061-4520044

Daftar

Isi...

Hal.1
34 LKPD Tahun Anggaran
2010 telah Diterima BPK RI
Perwakilan Provsu

Hal.2
- Dari Redaksi.
- Konsultasi DPRD Kabu
paten Simalungun

Hal.3
Perpustakaan Pegawai BPK
RI Perwakilan Provsu

Hal.4
Penyerahan LHP atas LKPD
kepada Beberapa Daerah

DARI REDAKSI

PEMERIKSAAN JANGAN DIANGGAP
RUTINITAS

Sebagai pemeriksa, tugas pemeriksaan merupakan suatu amanah yang harus diemban. Sering melakukan pemeriksaan, membuat pemeriksaan bagaikan menjadi sebuah rutinitas bagi para pemeriksa. Sebuah hal yang harusnya dihindari oleh seorang pemeriksa. Kenapa jangan sampai menjadi rutinitas?

Menurut berbagai tulisan ilmu psikologi, disebutkan bahwa pekerjaan yang rutin, biasanya jarang menggunakan otak dan pikiran. Yang menggerakkan setiap hari adalah sebuah insting yang terkode dalam jam sirkadian (jam alami pada otak), yang akan mengingatkan secara otomatis.

Bisa dibayangkan bila pemeriksaan hanya dianggap sebagai rutinitas menunaikan surat tugas, kebosanan akan melanda dan berimbas pada menurunnya hasil kinerja. Oleh sebab itu sebaiknya jangan melihat aktivitas pemeriksaan sebagai suatu kebiasaan atau rutinitas. Karena jika kita menganggap demikian, maka pemeriksaan akan amat sangat membosankan. Jika kejenuhan itu selalu ada dalam aktivitas yang dilakukan, maka mulai munculah stres ringan. Dampak yang nyata dari hal ini adalah timbulnya ketidakfokusan pekerjaan.

Agar hal ini tidak muncul, beberapa psikolog menyebutkan bahwa harus ada faktor pendorong dari dalam diri pelaku (internal) dengan menyelipkan kegiatan lain yang tanpa merugikan kegiatan intinya, dan juga faktor dari luar pelaku (eksternal) berupa kemauan untuk menciptakan kerjasama yang baik dengan lingkungan pekerjaannya.

Semoga dengan mulai menikmati kegiatan, pemeriksaan tidak lagi menjadi hal yang membosankan sehingga pemeriksa dapat meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas negara tersebut. [arra]

KONSULTASI DPRD KABUPATEN SIMALUNGUN
DENGAN BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMUT

DPRD Kabupaten Simalungun melakukan kunjungan konsultasi ke BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Jumat, 23 September 2011. Rombongan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Simalungun, Binton Tindaon, dan diterima oleh **Kepala Sub Auditorat Sumut I, Aryo Seto Bomantari**, didampingi oleh **Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas, Mikael P.H. Togatorop**, dan **Ketua Tim Senior, Ranni Agriadi**.

Kunjungan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Simalungun ini dalam rangka konsultasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2010. Para anggota DPRD meminta kejelasan terkait temuan tersebut dan hal-hal yang harus dilakukan untuk menindaklanjutinya.

BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera menanggapi positif kehadiran para anggota DPRD Kabupaten Simalungun tersebut. Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, pihak BPK RI Perwakilan Sumatera Utara memberikan jawaban lugas dan tegas, dan membuka diri apabila masih ada yang belum dipahami.

Diharapkan dengan pertemuan-pertemuan seperti ini, proses tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI bisa dipercepat dan dikondisikan sebagaimana mestinya. Apalagi mengingat selama ini masih banyak temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah daerah. Dengan fungsi kontrol yang dimiliki oleh DPRD, diharapkan mampu mempercepat penyelesaian tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan. [arra]

PERPUSTAKAAN BPK RI PERWAKILAN PROVINSI
SUMATERA UTARA, TENANG DAN MENCERDASKAN

Tenang dan nyaman. Itulah kesan pertama yang ditemui saat berkunjung ke Perpustakaan Pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Ruang perpustakaan yang berada di lantai 4 ini terletak berdampingan dengan ruang Sub bagian Hukum Humas. Ribuan buku tersusun rapi, terdiri atas berbagai judul dan disiplin ilmu.

Paling tidak ada tujuh alasan kenapa harus berkunjung ke perpustakaan ini. Pertama, Koleksi buku lengkap dari berbagai disiplin ilmu. Kedua, meja baca dengan konsep *one by one* untuk menjaga ketenangan saat membaca. Ketiga, meja baca dilengkapi dengan kursi yang nyaman. Ruangannya juga tenang, luas, dan nyaman dilengkapi dengan A.C. serta penerangan yang cukup.

Kelima, pengklasifikasian buku disini sudah menggunakan metode DCC. Keenam, penempatan buku di rak berdasarkan nomor klasifikasi sehingga memudahkan proses pencarian. Dan terakhir, koleksi buku disini tidak hanya tersedia dalam bahasa Indonesia, perpustakaan ini juga menyediakan buku berbahasa Inggris.

Bukan hanya buku-buku penunjang kegiatan pemeriksaan saja yang dapat ditemui disini, buku-buku akuntansi dan manajemen tersedia untuk para pegawai yang sedang melanjutkan pendidikannya ataupun sekedar dibaca untuk menambah wawasan. Selain itu buku-buku lain dari bidang ilmu lain juga tersedia, seperti Buku Editing Video (Teknologi Informasi), Memahami Bahasa Tubuh (Psikologi), Aku Ini Binatang Jalang (Sastra), bahkan buku-buku novel pun tersedia disini.

Menengok kelengkapan buku dan kenyamanan ruangnya, layak apabila kita berujar, **"AYO KE PERPUS"** [arra]

